**URGENSI PROGRAM *E-REPORTING* DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

Shofa Noor Salsabila

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Shofanoor13@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran akan pentingnya sistem informasi berbasis teknologi dalam pelaporan yang merupakan bagian dari penerapan sistem informasi manajemen di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Kinerja oleh Dwiyanto dimana konsep kinerja mencakup aspek Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa Aplikasi *e-*Reporting (*e-*Tepian) memiliki urgensi yang sangat signifikan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah secara nasional maupun daerah. Kinerja pembangunan daerah di Kota Samarinda telah baik dengan beberapa catatan yang harus diperbaiki yakni tingkat efektivitas pencapaian hasil kerja, kualitas SDM pelaksana program, serta kesesuaian anggaran yang dihasilkan.

Dengan demikian penulis menyarankan agar pemerintah Kota Samarinda Melakukan optimalisasi upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah melalui Aplikasi *e-*Reporting.

*Kata Kunci: Urgensi,e-Reporting(e-Tepian), Kinerja Pembangunan Daerah*

***ABSTRACT***

*This study aims to provide an importance of reporting technology-based information systems by the part of the implementation of management information systems in the Samarinda City Government Environment.*

*In this study, researchers used the performance theory by Dwiyanto where the performance concept contains of Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility, and Accountability. The research method used the descriptive qualitative method with an inductive approach. Data is collected through interviews, observation, and documentation and using member check as a data validity technique.*

*The conclusion from this study that the e-Reporting (e-Tepian) application has a very significant urgency in improving regional development performance nationally and regionally. Regional development performance in Samarinda City has been good with a number of records that have be improved, such the level of effectiveness of work achievement, the quality of human resources implementing the program, and the suitability of the budget produced.*

*Thus the authors suggest that the Government of Samarinda City Optimize the efforts made in order to improve the achievement of regional development performance through the e-Reporting Application.*

*Keywords: Urgency, e-Reporting (e-Tepian), Regional Development Performance*

**PENDAHULUAN**

 **Latar Belakang**

Perkembangan yang mencolok di era globalisasi saat ini mengindikasikan bahwa informasi serta pengolahan data semakin menjadi hal yang penting untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia. Informasi yang diinginkan semua orang seolah-olah dapat diketahui dengan kemajuan teknologi informasi. Secara global, media dan komunikasi mengubah perilaku masyarakat secara umum peradaban manusia melalui pemanfaatan teknologi informasi. Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya secara signifikan pun disebabkan dari adanya perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi dan telah mampu menyebabkan hubungan tanpa batas (*bordless*) di dunia. Sedangkan ketika gerak pembangunan melaju dalam hal era komunikasi dan informasi maka setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta harus dapat menunjang efektivitas, produktivitas dan efisiensi sesuai penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Hal ini merupakan salah satu syarat terpenuhinya sebuah pembangunan berbasis berkelanjutan.

Proses perencanaan pembangunan yang berhasil di Kota Samarinda oleh Badan perencanaan Pembangunan Daerah diterapkan sebagai sebab dari sistem yang saling menguatkan, salah satunya sistem pelaporan dan evaluasi yang merupakan kegiatan pelaporan oleh kepala daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota yang berkewajiban melakukan serangkaian kegiatan pelaporan secara kontinu sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan program yang dilaksanakan SKPD berupa penyampaian laporan realisasi kegiatan dan dituangkan kedalam bentuk instrumen dan indikator pada saat kegiatan mulai, berjalan dan pada akhir pelaksanaan program untuk kemudian digunakan dalam evaluasi pelaksanaan kinerja pembangunan daerah.

Salah satu permasalahan penggunaan data dalam proses perencanaan adalah terbatasnya ketersediaan data dan informasi serta kinerja pegawai yang bekerja di bidang perencanaan dan sistem yang menjalankannya tidak akurat secara menyeluruh serta sesuai dengan kondisi terkini(*up to date*). Hal ini menyebabkan proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan data yang tidak terkini dan terkesan lambat dalam pelaksanaannya serta kurangnya sinkronisasi data yang terdapat di setiap institusi terkait sehingga data yang seharusnya saling berhubungan banyak terpisah-pisah dan sulit diakses. Hal ini juga berdampak besar pada proses penganggaran yang menghasilkan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di setiap daerah menjadi tidak merata.

Hal ini dikarenakan kinerja pegawai dalam proses pelaporan yang akan di anggarkan terhambat karena kurangnya efektivitas dan efisiensi waktu yang dibutuhkan antar SKPD dalam merencanakan kebutuhannya kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk kemudian dikaji oleh Bappeda dan adanya ketergantungan manusia dalam hal proses pelaporan sehingga proses penganggaran menjadi terlambat serta timbul ego sektoral antar SKPD yang menginginkan prioritas penganggaran dalam perencanaan program yang diterapkan.

Dengan memperhatikan gambaran diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“URGENSI PROGRAM *E-REPORTING* DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA”.**

**Tujuan Penelitian**

Bertolak dari latar belakang yang telah dikamukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi *e-Reporting* dalam rangka peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah oleh Pemerintah Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat Kinerja Pembangunan Daerah dalam penerapan *E-Reporting* pada Pemerintah Kota Samarinda.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah melalui program *E-Reporting*.

**Hasil Kajian Pustaka**

Penelitian ini menggunakan teori pengukuran Kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (Sudarmanto, 2009) yang menjelaskan secara rinci terdapat 5 indikator mengukur kinerja organisasi , yaitu:

1. Produktivitas

Dengan mengidentifikasi tingkat efisiensi, efektivitas, pelayanan dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan.

1. Kualitas layanan

Dengan mengidentifikasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan

1. Responsivitas

Dengan mengidentifikasi kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

1. Responsibilitas

Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

1. Akuntabilitas

Seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh *stakeholders.*

 **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif. Ruang lingkup dalam penelitian ini mengungkapkan bagaimana urgensi program *e-Reporting* dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah sehingga kedepannya program *e-Reporting* dapat digunakan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Samarinda. Urgensi *e-Reporting* dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah memiliki ruang lingkup yaitu:

1. Kinerja, dalam hal ini kinerja organisasi dalam hal pembangunan daerah yang terintegrasi dengan aplikasi *e-Reporting* dalam kaitannya dengan penunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.
2. Faktor penghambat pelaksanaan progrm *e-Reporting* dalam konteks peningkatan kinerja pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Dalam hal ini ditekankan pada penggunaan aplikasi *e-Reporting*  yang dapat memberi dampak pada pelaksanaan pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kota Samarinda.

Untuk lebih jelas ruang lingkup dapat dikategorikan dalam tabel yang menjelaskan secara detail mengenai operasionalisasi ruang lingkup penelitian serta konsep dalam penelitian berikut:

**Operasionalisasi Lingkup Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konsep | Dimensi | Indikator |
| **1** | **2** | **3** |
| Teori Pengukuran Kinerja  | Produktivitas | Efisiensi Program dalam pelayanan, meliputi:1. Mengukur dan menganalisis perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan
2. Proporsi *input* dan *output* dapat menghasilkan *outcomes* yang sesuai
3. Tingkat keberhasilan pemanfaatan hasil manajemen dengan sumber daya yang digunakan
4. Pelayanan terhadap program yang diberikan dapat terlaksana dengan benar sesuai kebutuhan dan waktu serta biaya yang telah ditetapkan
 |
| Efektivitas Penerapan Program, meliputi:1. Tolak ukur pencapaian hasil terhadap tujuan pelaksanaan program
2. Sasaran yang direncanakan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan
 |
| Kualitas Pelayanan | Identifikasi kepuasan *stakeholder* terhadap program meliputi:1. Faktor pendukung pelaksanaan program meliputi sarana dan prasarana sesuai dengan tingkat keterlaksanaan program dan tepat pada sistem pelayanan yang dilakukan (*Tangible)*
2. Tingkat kemampuan sumber daya dalam pelaksanaan program sesuai kecermatan dan standar pelayanan serta keahlian dalam pengaplikasian program sesuai dengan sarana dan prasarana yang disediakan (*Reliability*)
3. Jaminan ketepatan waktu, biaya, legalitas dan kepastian biaya dalam pelayanan oleh program yang dilaksanakan (*Assurance)*
 |
| Responsivitas | 1. Identifikasi kemampuan dalam menganalisa kebutuhan tiap SKPD
2. Tingkat keselarasan antara pelayanan yang disajikan program dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perencanaan tiap SKPD
3. Pengukuran kemampuan pelaksana progran dalam menjalankan misi dan tujuan program dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat
 |
| Responsibilitas | 1. Identifikasi kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip administrasi yang sesuai
2. Kesesuaian pertanggungjawaban program terhadap pembuat kebijakan sehingga transparansi dapat diketahui
 |
| Akuntabilitas | 1. Pengukuran tingkat kesesuaian penyelenggaraan program dengan pertanggungjawabannya pada masyarakat
2. Penyesuaian program dapat ditinjau dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pembuat kebijakan dalam bertindak sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan
 |

Sumber : Dwiyanto dalam Sudarmanto, 2009

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. . Informan dalam penelitian ini adalah pejabat dari instansi terkait pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pejabat di lingkungan pemerintah Kota Samarinda serta pelaksana program terkait aplikasi *e-Reporting.* Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
3. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Bagian Evaluasi Pembangunan Bappeda Kota Samarinda
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Samarinda
6. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan Kota Samarinda
7. Pelaksana Program Tiap SKPD
8. Masyarakat

Peneliti dalam melakukan pengamatan menggunakan teknik *purposive sampling* serta *snowball sampling*. Pengumpulan data yang digunakan penulis yakni menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Pada penelitian ini yang menjadi instrumen utama yakni peneliti serta wawancara yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data dan *member check.*

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam RPJP telah disebutkan bahwa salah satu isu strategis pembangunan Kota Samarinda adalah mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota berbasis pada *Smart City*. Tujuan secara keseluruhan dari realisasi *Smart City* adalah menjadikan Kota Samarinda sebagai Kota Layak Huni terutama bagi generasi mendatang melalui optimalisasi berbagai hal seperti cerdas berkehidupan (*smart living*), cerdas masyarakat (*smart society*), cerdas tata kelola pemerintahan (*smart governance*), cerdas ekonomi (*smart economy*), cerdas membranding kota (*smart branding*), dan cerdas lingkungan (*smart environment*).

Untuk mencapai *smart city*, Kota Samarinda harus tetap memperhatikan *sustainable developmen*t atau pembangunan berkelanjutan. Jika dalam usaha mencapai smart city tidak memperhatikan pembangunan berkelanjutan maka lingkungan akan menjadi rusak sebagai akibat dari tidak adanya pembangunan yang berkelanjutan yang tidak memperhatikan lingkungan.

Dalam membentuk suatu tata kelola pemerintahan yang baik, Kota Samarinda sebagai salah satu dari 100 Kota di Indonesia yang terpilih dalam program *Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia* memiliki konsekuensi harus mempersiapkan secara bertahap yang bersifat digital dan sistem digitalisasi pengelolaan kota yang terintegrasi. Pembangunan daerah yang terpadu pada tiga aspek yang telah dikemukakan yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial menjadi dasar prinsip pembentukan 6 pilar kota cerdas yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Samarinda sehingga keinginan masyarakat terhadap perkembangan dan kemajuan Kota Samarinda dapat terwujud segera dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda.

Konsep ini ketika dipercaya banyak pihak dapat menjawab persoalan permasalahan kota-kota yang ada di Indonesia. Integrasi yang dilaksanakan melalui pelayanan masyarakat Kota oleh pemerintah berbasis manajemen Kota Cerdas ada untuk menanggulangi permasalahan yang sangat sering terjadi di area kota terutama Kota Metropolitan dengan permasalahn klasik seperti banjir, macet dan lain sebagainya. Pernyataan dilengkapi oleh salah satu inisiator *smart city* yang menegaskan bahwa semua masalah kependudukan dapat diselesaikan melalui integrasi di segala sektor khususnya bantuan infrastruktur teknologi informasi.

 Program *e-Reporting* merupakan program khusus pemerintah yang dirancang untuk menangani proses pelaporan pelaksanaan pembangunan melalui realisasi anggaran dalam aspek fisik dan keuangan pada tiap Perangkat Daerah agar berjalan efektif dan efisien. Di Kota Samarinda, program ini dibuat dalam bentuk aplikasi bernama *e-*Tepian, yang bermakna *e* Terkendalinya Capaian Kinerja Pembangunan.

 Siklus pelaporan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan selama kurun waktu sistem pemerintahan membutuhkan waktu yang panjang dan kebutuhan akan manusia yang cukup banyak sehingga melelahkan dan menghambat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelaporan pada setiap Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah untuk kemudian di evaluasi dan disusun kembali anggaran dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pada tahun 2017 dibangun kerangka sistem Aplikasi *e-*Tepian untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam proses pelaksanaan pembangunan yang terjadi setiap dan sepanjang tahun ke tahun.

Pada penerapan selanjutnya Sistem Aplikasi *e-* Tepian dibuat atas dasar beberapa peraturan perundang-undangan di atas. Hal ini dimaksudkan agar format yang ada dalam sistem tersebut terpenuhi kebutuhannya dalam hal pemenuhan data-data pelaporan pelaksanaan pembangunan dalam lingkup realisasi anggaran secara fisik dan keuangan sesuai dengan aturan yang ada, khususnya mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang kemudian lebih khusus dilaksanakan Pemerintah Kota Samarinda menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Dalam penerapannya, Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal pelaporan pelaksanaan pembangunan melalui usulan pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja oleh Bappeda dan progres keuangan oleh BPKAD sehingga didapatkan pelaporan yang nyata sesuai data dan rencana yang telah dibuat dan dikembangkan oleh tiap SKPD.

*E-*Tepian merupakan sebuah sistem pelaporan berbasis elektronik yang menjadi tolak ukur penting tercapainya kinerja pembangunan terkhusus pada Kota Samarinda. Aplikasi ini dirancang terpusat pada permasalahan pelaporan, evaluasi dan penyajian data pelaksanaan pembangunan yang tidak berjalan dengan mudah, cepat, dan akurat. Pelaksanaan pelaporan secara manual yang terjadi beberapa tahun terakhir menjadi permasalahan bagi pemerintah Kota Samarinda selain daripada pembentukan Kota Samarinda menuju *smart city* yang terkendali dengan anggaran yang dimanfaatkan secara maksimal pada setiap *stakeholder*.

Pada pelaksanaannya, *e-*Tepian mengembangkan aplikasi secara tepat dan cepat dalam pengelolaan web yang berisikan data mengenai proses pelaporan secara elektronik. Hal tersebut mengindikasikan adanya proses kesempurnaan dalam sistem pelaporan pelaksanaan pembangunan dan anggaran pembangunan dengan bukti meningkatnya progres realisasi anggaran secara fisik dan keuangan dari tahun sebelumnya yakni sebelum diterapkannya program *e-*Tepian dengan setelah diterapkannya program tersebut.

Implikasi yang didapatkan dari terselenggaranya aplikasi *e*-Tepian adalah terstrukturnya anggaran pembangunan sehingga mengurangi angka kelebihan anggaran yang terkesan tidak efisien dan efektif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan utamanya pada pelayanan publik. Dengan progres fisik yang meningkat pula, masyarakat dapat mengetahui secara transparan bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi yang ditawarkan pemerintah Kota Samarinda untuk masyarakat agar terciptanya Kinerja Pembangunan Daerah yang terkendali dan tepat sesuai harapan masyarakat dan tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam aplikasi *e*-Tepian dijelaskan secara terperinci bagaimana proses peng*input*an data pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pendukung yang menyempurnakan aplikasi ini, yaitu:

1. proses *log in* aplikasi dengan memasukkan alamat url yakni <https://e-tepian.samarindakota.go.id> dengan mengetik *username* dan *password* yang telah diberikan oleh operator pemrakarsa program yakni Sekretariat *e*-Tepian Kota Samarinda ke masing-masing operator *e*-atepian dan pilih Tahun *input* Pelaporan, kemudian ketik *Login*.
2. Pada aplikasi ini terdapat pula metode Pengadaan Barang dan Jasa dengan pencantuman dasar hukum yakni Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa aplikasi ini didasarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Untuk masyarakat dapat melihat transparansi sistem pelaporan ini dengan melihat Sturktur Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan melihat pada menu Dashboard tanpa *Login* sehingga data dapat terenkripsi dengan aman tanpa adanya perubahan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan *update* dilaksanakan dengan cepat sehingga perkembangan dapat dilihat secara cepat dan transparan.
4. Terdapat menu peng*input*an data dengan penampilan data aktif atau tidak aktif untuk data yang telah di *input* tetapi tidak ditampilkan. Hal ini mencegah kekeliruan dalam penambahan data selanjutnya sehingga pihak operator melaksanakan *check* sebelum data ditampilkan dengan format aktif.
5. Target Rencana. Pada submenu ini menampilkan tagret rencana keuangan dan fisik setiap bulannya berdasarkan isian target rencana keuangan dan fisik paket pekerjaan pada Submenu Rincian Kegiatan. Pada submenu ini target dan realisasi dapat diperinci dengantransparan sehingga pemimpin perangkat daerah dapat melakukan pengawasan terhadap pegawai pelaksana anggaran pembangunan dan pelaksana pembangunan.
6. Pada submenu relisasi SKPD, terdapat tanpilam data rekapan realisasi keuangan dan fisik berdasarkan hasil *input* dari operator SKPD dan data realisasi keuangan dari SIMDA. Pada bagian ini, proses koordinasi antara perencana kegiatan, penyelenggara anggaran dan pelaksana anggaran dan pembangunan dapat terlihat dengan transparan.
7. Program realisasi SKPD dapat dilihat pengawasan dan rekapannya pada grade SKPD yang menjelaskan bahwa seberapa besar capaian kinerja antar SKPD dengan yang lain sehingga persaingan yang diciptakan dalam hal pencapaian kinerja berjalan dengan sehat. Dan hal tersebut dievaluasi pada tiap bulannya.

Kinerja Pembangunan Daerah di Kota Samarinda telah baik dengan beberapa kekurangan dan catatan. Hal ini tampak dari indikator pengukuran kinerja:

1. Produktivitas, pada tingkat efektivitas yakni tercapainya hasil kerja tiap SKPD yakni pembenahan sistem pelaporan untuk penyusunan prioritas kegiatan pada tiap SKPD. Dengan beberapa catatan yakni efisiensi pelaksanaan program kurang dibuktikan dengan belum terpenuhinya pembiayaan yang sesuai dengan syarat waktu terlaksananya penerapan program.
2. Kualitas Pelayanan, kualitas pelayanan yang maksimal diwujudkan melalui adanya aplikasi *e*-Tepian yang mengendalikan capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kota Samarinda yang diberlakukan demi kelancaran dalam menjalankan proses pelaporan pelaksanaan pembangunan tetapi harus adanya perbaikan kembali pada sarana dan prasarana meliputi infrastruktur dan suprastruktur sesuai tingkat keterlaksanaan demi menunjang kelancaran penggunaan aplikasi *e*-Tepian serta kecermatan dan standar pelayanan yang dapat dirasakan dampaknya. Hal ini mengisyaratkan perlunya dikembangkan aplikasi lebih baik lagi demi meningkatkan kualitas pelayanan yang prima serta pemahaman staf pelaksana dalam aplikasi dan pemahaman program.
3. Responsivitas, responsivitas ditunjukkan oleh prioritas pembangunan dan proses anggaran yang disusun oleh tiap SKPD diamati secara mendalam. Hal ini diperlukan perbaikan kembali agar dapat mengevaluasi dan mengendalikan pembangunan dengan baik walaupun ketika berhadapan dengan masyarakat mereka menanggapi baik serta minat yang ditunjukkan sangat positif dengan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan dan anggaran pembangunan agar dapat mengevaluasi dan mengendalikan pembangunan.
4. Responsibilitas, diwujudkan dengan ketaatan terhadap aturan dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dibuat kepada tiap SKPD. Prosedur tersebut telah tertuang dalam standar pelayanan oleh aplikasi *e*-Tepian serta kesesuaian antara web dengan pelaksanaan yang ada di lapangan menunjukkan bentuk ketaatan terhadap aturan karena banyaknya aparat penyelenggara menjadi oknum dalam prosespelaporan pelaksanaan pembangunan dan anggaran pembangunan sehingga keterselenggaraan pelayanan dan pengembangan aplikasi tidak terganggu dan dapat menampung prioritas kegiatan dari masyarakat.
5. Akuntabilitas, pertanggungjawaban tiap SKPD pelaksana program dalam penyelenggaraan aplikasi *e*-Tepian berpedoman pada aturan yang ada dan adanya kontrol dari pemerintah daerah melalui hibauam dan sosialisasi. Staf sebagai tenaga operasional yang langsung melayani masyarakat melaporkan kegiatan prioritas SKPD kepada pimpinan terkait pengembangan aplikasi, termasuk pelaporan secara berkala mengenai prkembangan realisasi anggaran.

Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kinerja Pembangunan daerah melalui aplikasi *e*-Tepian adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung
2. Dukungan Pemerintah Kota Samarinda secara keseluruhan
3. Kepercayaan masyarakat
4. Keberhasilan Kota Samarinda dalam pelayanan publik melalui penghargaan *Indonesia Attractive Award* (IAA) Kategori Platinum Pada Tahun 2018
5. Faktor penghambat
6. Manajemen yang kurang baik
7. Pengembangan aplikasi yang belum sempurna
8. Belum adanya penganggaran khusus untuk aplikasi *e*-Tepian
9. Upaya pemerintah
10. Melakukan sosialisasi penerapan sistem
11. Meningkatkan kinerja aparatur pengembang program
12. Mempedomani sistem dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat, aturan hukum serta dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan pembangunan dan anggaran pembangunan
13. Senantiasa melakukan koordinasi
14. Memelihara sarana dan prasarana pendukung

**KESIMPULAN**

Aplikasi *e*-Tepian memiliki pengaruh penting dan signifikan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah secara nasional maupun daerah serta menciptakan kinerja pembangunan yang terkendali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja pembangunan daerah Kota Samarinda telah baik dengan beberapa catatan perbaikan yakni tingkat efektivitas pencapaian hasil kerja, kualitas sumber daya dan kesesuaian anggaran yang dihasilkan.

**SARAN**

1. Pemerintah hendaknya melakukan optimalisasi upaya dalam meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah Melalui *e-*Tepian
2. Dilakukan peningkatan kapasitas server dan jaringan internet untuk membantu proses pemasukan data,kontrol ulang kepentingan *e-*Tepian apakah sesuai dengan keninginan masyarakat, memperhatikan proses realisasi dan kebutuhan serta konsistensi terhadap program dan kegiatan untuk mengatasi kendala yang ada
3. Perlu adanya diskusi atau forum yang mengkaji pengembangan aplikasi ini dengan mengintegrasikan data yang akurat dengan sistem yang telah diterapkan oleh sektor privat agar tercipta kesempurnaan.